

ANALISIS POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

LAILAN SAFINA HASIBUAN¹

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email :lailanhsb@gmail.com**

RIKA LESTARI²

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Simalungun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Simalungun.

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian dan diukur dalam suatu angka skala numeric. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai dan menyebarkan kuesioner kepada rumah tangga miskin di Kecamatan Ujung Padang. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah dengan metode perhitungan yang sangat sederhana yang menggunakan perhitungan persentase (%) dari setiap variabel yang telah tercetak pada kuesioner yang digunakan penulis dalam mengambil data langsung kemasayarakat sebagai bahan untuk menganalisis kenyataan yang terjadi Kabupaten Simalungun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan lebih besar dari rata-rata pengeluaran non makanan. Hal ini disebabkan karena penghasilan para responden yang tidak mencukupi.

Kata kunci: pola pengeluaran, rumah tangga miskin

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Proses pembangunan menyangkut berbagai aspek baik lahiriah (material), maupun batiniah (spiritual) dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya dengan konsep pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui delapan tujuan *Millenium Development Goals (MGDs)* sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015. Tujuan pertama *MDGs* berkenaan dengan upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan kelaparan. Tujuan ini memiliki dua sasaran yang tampak tidak terlalu ambisius: mengurangi

separuh jumlah orang-orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1\$ sehari dan mengurangi hingga setengah jumlah orang yang menderita kelaparan. “Mengurangi separuh kemiskinan” kini berfungsi sebagai batu ujian bagi pencapaian *MDGs* secara keseluruhan. Pencapaian sasaran tujuan ini memerlukan juga kemajuan pencapaian dari semua tujuan lainnya.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang di anggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap Negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekankan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi (BPS, 2014).

Krisis multidimensi tahun 1998 yang merubah hampir seluruh sisi-sisi kehidupan bangsa secara gaduh dan gradual nampaknya lebih fokus pada perubahan sistem politik. Pemerintahan pasca krisis yang relatif cepat masa baktinya (Pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati) mampu mengawal Indonesia keluar dari krisis dasyat yang meruntuhkan NKRI dan berhasil melakukan transisi demokrasi, walaupun dengan pengorbanan lepasnya Timor Timur, Pulau Sidapan, dan Pulau Ligitan. Proses politik yang demikian hebat mengakibatkan pembangunan ekonomi agak terabaikan dan pengentasan penduduk miskin menjadi sulit dilakukan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 30,02 juta jiwa, tahun 2012 sebanyak 29,13 juta jiwa, dan mengalami penurunan kembali tahun 2013 yaitu sebanyak 28,07 juta jiwa, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 28,28 juta jiwa.

Tingginya jumlah penduduk miskin bukanlah satu-satunya dimensi penting dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dimensi lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah tingginya disparitas kemiskinan, baik secara regional maupun antar daerah pedesaan dan perkotaan. Perbedaan karakteristik yang sangat tajam antar berbagai wilayah yang tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia dan perbedaan hasil kemajuan pembangunan antar wilayah menyebabkan kondisi kemiskinan yang terjadi juga bervariasi.

Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua yang mencapai 27,80 %. Tingkat kemiskinan terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 4,09%. Sementara itu, jika dilihat dari sisi sebaran penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 4.748.420 jiwa, kemudian penduduk miskin di Jawa Tengah yaitu sebanyak 4.561.830 jiwa, dan penduduk miskin di Propinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 4.238.960 jiwa. Kemudian di Sumatera Utara penduduk miskinnya sebanyak 1.360.600 jiwa.

Kemiskinan di Indonesia melanda di hampir seluruh Provinsi di Indonesia salah satunya di Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami tren penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 10,83%, pada tahun 2012 sebesar 10,41%, dan tahun 2013 sebesar 9,83% dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 0,2% yang menjadi 9,85%.

Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 kota. Masing-masing Kabupaten/Kota masih banyak penduduk yang mengalami kemiskinan. Berikut akan disajikan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2011-2013

Kabupaten/Kota	Jumlah (000 jiwa)			Persentase (%)		
	2011	2012*)	2013	2011	2012*)	2013
Kabupaten						
01. N i a s	25,39	24,99	23,28	19,11	18,67	17,28
02. Mandailing Natal	49,05	48,39	40,69	11,98	11,58	9,62
03. Tapanuli Selatan	30,39	29,91	30,77	11,40	11,10	11,33
04. Tapanuli Tengah	50,21	49,61	52,00	15,96	15,03	15,41
05. Tapanuli Utara	33,57	33,09	33,75	11,89	11,55	11,68
06. Toba Samosir	16,93	16,64	16,96	9,67	9,43	9,54
07. Labuhanbatu	42,61	42,08	38,14	10,15	9,61	8,53
08. A s a h a n	73,39	72,32	80,54	10,85	10,52	11,60
09. Simalungun	84,35	83,09	87,72	10,21	9,97	10,45
10. D a i r i	25,87	25,49	24,00	9,48	9,28	8,68
11. K a r o	37,22	36,71	36,93	10,49	9,93	9,79
12. Deli Serdang	92,33	91,19	91,97	5,10	4,78	4,71
13. L a n g k a t	100,80	99,27	104,31	10,31	10,02	10,44
14. Nias Selatan	57,80	56,94	56,96	19,71	19,05	18,83
15. Humban Hasundutan	17,50	17,25	17,94	10,09	9,73	10,00
16. Pakpak Bharat	5,39	5,32	4,94	13,16	12,40	11,28
17. Samosir	18,95	18,48	17,18	15,67	15,17	14,01
18. Serdang Bedagai	60,50	59,53	56,55	10,07	9,89	9,35
19. Batu Bara	44,34	43,66	46,86	11,67	11,24	11,92
20. Padang Lawas Utara	24,04	23,72	25,01	10,64	9,98	10,28
21. Padang Lawas	24,04	23,64	21,23	10,56	9,80	8,59
22. Labuhanbatu Selatan	41,74	41,21	37,33	14,86	13,96	12,36
23. Labuhanbatu Utara	39,34	38,68	39,09	11,77	11,34	11,34
24. Nias Utara	39,15	38,51	40,78	30,44	29,50	30,94
25. Nias Barat	24,24	23,84	24,88	29,32	28,57	29,65
Kota						
26. S i b o l g a	11,25	11,13	11,08	13,18	13,00	12,90
27. Tanjungbalai	24,24	23,86	24,20	15,52	14,86	14,85
28. Pematangsiantar	26,45	26,01	26,61	11,15	10,79	10,93
29. Tebing Tinggi	18,27	18,02	17,98	12,44	11,93	11,74
30. M e d a n	204,19	201,06	209,69	9,63	9,33	9,64
31. B i n j a i	17,41	17,16	17,48	7,00	6,72	6,75
32. Padangsidimpuan	19,52	19,24	18,44	10,08	9,60	9,04
33. Gunungsitoli	40,97	40,40	41,10	32,12	30,85	30,94

Sumber : BPS

Keterangan: *) Hasil backasting menggunakan penduduk hasil proyeksi

Berdasarkan data diatas, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Utara yaitu mencapai 30,94% di tahun 2013, kemudian Nias Barat sebesar 29,65 di tahun 2013, tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 4,71%. Sementara itu, jika dilihat dari sisi sebaran penduduk miskin, Kabupaten Simalungun memiliki banyak penduduk miskin setelah Kabupaten Langkat dan Deli Serdang yaitu sebesar 87,72 jiwa.

Sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun juga merupakan salah satu contoh wilayah yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Berikut tabel garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun.

Tabel 2
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Simalungun 2008-2013

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/Bulan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase (%)
2008	201 811	124,65	14,75
2009	210 265	107,50	12,67
2010	233 391	87,7	10,73
2011	256 591	84,4	10,21
2012	282 097	81,8	9,96
2013	270 588	87,7	10,45

Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun sebanyak 124,65 ribu jiwa atau 14,75% ditahun 2008, 2009 sebanyak 107,50 ribu jiwa atau 12,67%, 2010 sebanyak 87,7 ribu jiwa atau 10,73% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2012 sebanyak 81,8 ribu jiwa atau 9,96% dan sebanyak 87,70 ribu jiwa atau 10,45% mengalami kenaikan ditahun 2013.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh seseorang. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka pendapatannya juga akan rendah, dan sebaliknya. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga menyebabkan mereka kesulitan untuk memasuki pekerjaan formal dan mempunyai pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan yang memadai. Walaupun penduduk miskin ada yang pernah menamatkan pendidikan SLTA keatas, namun jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan penduduk miskin pendidikan tertingginya hanya tamatan SD. Rata-rata pendapatan masyarakat yang memadai dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi yang tinggi berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak akan berarti bila hanya dinikmati sejumlah kecil masyarakat. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dalam arti penduduk miskin

dapat meningkatkan pendapatannya lebih cepat dari penduduk tidak miskin, sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pendapatan yang rendah akan menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi, Pendapatan juga akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi seseorang. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan lebih seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya.

Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi non makanan, begitupun sebaliknya. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk bukan makanan. Oleh karena motif konsumsi atau pola konsumsi suatu kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh pendapatan. Atau secara umum dapat dikatakan tingkat pendapatan yang berbeda-beda menyebabkan keanekaragaman taraf konsumsi suatu masyarakat atau individu. Berikut tabel dibawah menunjukkan pengeluaran rata-rata perkapita perbulan untuk makanan dan non makanan.

Tabel 3
Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Perbulan di Kabupaten Simalungun
2012-2014

Tahun	Makanan	Non Makanan
2011	342 491,00	249 190,00
2012	345 070,00	258 748,00
2013	351 454,00	270 076,00
2014	397 995,00	336 669,00

Sumber : BPS Sumatera Utara

Pada tabel diatas data pengeluaran rata-rata perkapita selama sebulan untuk makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Konsumsi penduduk Simalungun sebesar Rp. 397.995 merupakan konsumsi makanan di tahun 2014 sementara pada tahun 2013 sebesar Rp. 351.454. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi dari makanan ke non makanan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, adalah “Bagaimana pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Simalungun ?”

B. Kajian Teoritis

Konsumsi

Konsumsi berasal dari kata bahas inggris yaitu “*consumption*” yang berarti pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga keatas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat keatas makanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan keatas pembelanjaan atau pengeluaran konsumsi. Barang-barang yang diproduksi khusus untuk digunakan oleh masyarakat

untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Barang-barang konsumsi dibedakan kepada tiga golongan yaitu:

- 1) Yang mudah rusak, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan
- 2) Yang setengah tahan lama (*semi-chirable goods*), seperti sepatu dan pakaian
- 3) Yang tahan lama (*chirable goods*) yaitu, seperti mobil, motor dan televisi (Sukirno, 2003:339).

Pada dasarnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, dimana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan (Y) maka konsumsinya (C) juga makin tinggi.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhi kebutuhan pangan (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (BPS, 2009).

Kemiskinan merupakan kondisi absolute atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat karena sebab natural atau kultural. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk menaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya. Tata nilai itu dinamis, semakin lama mengarah kesifat-sifat materialis (Nugroho dan Dahuri, 2002,hal:165).

Menurut Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, antara lain dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua elemen yaitu: 1) pengeluaran yang dilakukan untuk gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; 2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Kuncoro, 2003;123)

Ukuran dan Kriteria Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2004), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam kondisi miskin.

Menurut BPS (2009) survey sosial ekonomi rumah tangga, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- 3) Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- 4) Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- 5) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

Menurut Todaro kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolute adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Demikian juga yang dikemukakan oleh Webster yang menjelaskan konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut dengan istilah “*relative deprivation*” merupakan suatu pendekatan yang bersifat sangat sosial, dimana kemiskinan itu sendiri merupakan suatu produk persepsi sosial, terhadap kebutuhan manusia (Todaro, 2008:203).

Kuncoro melihat kemiskinan dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana penduduk hidup dibawah garis kemiskinan tertentu atau pendapatan yang diperolehnya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan atau berkaitan erat dengan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2003:122).

Menurut World Bank (Dahuri dan Nugroho, 2002,hal:170), mengukur kemiskinan bertujuan, antara lain :

- 1) Melihat sejauh mana kemiskinan terjadi : Lokasi, jumlah sebaran, kondisin masyarakat, dan ketampakan lainnya.
- 2) Memberikan data statistik yang berguna bagi analisis dan perencanaan pembangunan serta penghapusan kemiskinan.
- 3) Mempengaruhi pola kebijakan dan pengambilan keputusan yang kelak diterapkan.

BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah di sosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin,yaitu :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Luas lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Hanya sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/poloklinik.
- 12) Sumber penghasilan rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Indonesia secara luas digunakan pertama kali dikenalkan oleh Sajogyo pada tahun 1964 yang diukur berdasarkan konsumsi setara beras setahun. Menurut Sajogyo terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan. BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count index*) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar Negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. World Bank mengelompokkan penduduk kedalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibanding total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut: jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan sedang. Jika proporsi jumlah penduduk dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian dan di ukur dalam suatu angka skala numerik (angka) (Kuncoro, 2013).

Defenisi operasional variabel adalah:

1. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang menerima beras miskin, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan yang diukur dalam satuan Kepala Keluarga (KK).
2. Pengeluaran konsumsi pangan adalah total pengeluaran yang dilakukan masyarakat untuk bahan makanan dalam satuan rupiah per bulan.
3. Pengeluaran konsumsi non pangan adalah total pengeluaran yang dilakukan masyarakat untuk bukan bahan makanan yang diukur dalam satuan rupiah per bulan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simalungun, yaitu Kecamatan Ujung Padang. Populasinya adalah jumlah rumah tangga sasaran yang menerima beras miskin dan bantuan langsung tunai di Kecamatan Ujung Padang yang berjumlah 3.629. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel probabilitas, yaitu jenis sampel kluster. Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, maka diambil Kecamatan Ujung Padang sebagai Kecamatan sampel. Alasan memilih Kecamatan Ujung Padang adalah berdasarkan jumlah rumah tangga sasaran yang terbanyak. Dari 20 Desa yang ada di Kecamatan Ujung Padang, maka diambil Desa Tinjowan untuk mewakili bagian Utara, Desa Pulo Pito Marihat mewakili bagian Timur, Desa Sordang Bolon untuk mewakili bagian Selatan, dan Desa Riah Naposo untuk mewakili bagian Barat. Oleh karena jumlah rumah tangga sasaran di Kecamatan Ujung Padang diketahui, maka untuk mengambil unit sampel digunakan rumusan *Slovin*.

$$\text{Rumus Slovin} \quad n = \frac{N}{1+N^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kesalahan pengambilan sampel yang masih di tolerir
(misalnya 1%, 5%, 10%)

Dalam penelitian ini tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10%.

$$\begin{aligned} \text{Maka :} \quad n &= \frac{3.6}{1+3.6 \quad (0.1)^2} \\ &= 97,33 \quad 97 \end{aligned}$$

Analisa data ini dilakukan dengan metode perhitungan yang sangat sederhana yang menggunakan perhitungan persentase (%) dari setiap variabel yang telah diuraikan pada kuesioner yang digunakan penulis dalam mengambil data langsung kemasyarakat sebagai bahan untuk menganalisis kenyataan yang terjadi Kabupaten Simalungun.

D. PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Keadaan Penduduk Kabupaten Simalungun

Simalungun sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, letaknya diapit oleh 8 Kabupaten/Kota yaitu Serdang Bedagai, Deli Sedang, Karo, Tobasa, Samosir, Asahan, Batu Bara, dan Kota Pematang Siantar. Letak astronomisnya antara 02°36' -03°18' LU dan 98°32'-99°35' BT dengan luas 4.386,60 km² berada pada ketinggian 0-1.400 meter diatas permukaan laut dimana 75 persen lahannya berada pada kemiringan 0-15% sehingga Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten

Madina dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan wisata Danau Toba-Parapat.

Kabupaten Simalungun terdiri dari 31 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Raya sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Haranggaol Horison dengan rata-rata jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 51,42 km dimana jarak terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean 127 km dan Kecamatan Ujung Padang 113 km.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu Kabupaten yang banyak penduduk miskin nya. Penduduk miskin di Kabupaten Simalungun tahun 2013 tercatat sebanyak 87,7 ribu jiwa tersebar pada 31 Kecamatan. Kecamatan Ujung Padang merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga sasaran terbesar, yaitu 3.629. Berikut ini adalah jumlah rumah tangga sasaran di Kabupaten Simalungun.

Tabel 4
Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Simalungu

Kecamatan	RTS
Silimakuta	796
Pematang Silimahuta	1.042
Purba	1.906
Haranggaol Horison	418
Dolok Pardamean	1.035
Sidamanik	1.849
Pematang Sidamanik	1.224
Girsang Sipangan Bolon	644
Tanah Jawa	2.977
Hatonduhan	1.651
Dolok Panribuan	1.920
Jorlang Hataran	1.404
Panei	1.890
Panombelan Panei	1.628
Raya	2.598
Dolok Silou	740
Silou Kahean	1.760
Raya Kahean	1.376
Taplan Dolok	1.909
Dolok Batu Nanggar	2.411
Siantar	2.308
Gunung Malela	1.533
Gunung Maligas	1.092
Hutabayu Raja	1.448
Jawa Maraja BahJambi	812
Pematang Bandar	1.543
Bandar Huluan	1.166
Bandar	2.990
Bandar Masilam	1.887
Bosar Maligas	2.206
Ujung Padang	3.629

Sumber: BPS Sumatera Utara

Gambaran Daerah Sampel Penelitian

Kecamatan Ujung Padang sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Simalungun yang memiliki luas 228,49 km² atau sama dengan 5,23% luas Kabupaten Simalungun. Letak geografis Kecamatan Ujung Padang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Batu Bara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Huta Bayu Raja dan Kabupaten Asahan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bosar Maligas dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan. Letak astronomis Kecamatan Ujung Padang berada pada 02°95314 LU dan 99°54341 BT.

Kecamatan Ujung Padang memiliki 19 desa/nagori dan memiliki 1 kelurahan, yaitu : Ujung Padang, Huta Parik, Dusun Ulu, Tinjowan, Sayur Matinggi, Taratak Nagodang, Sordang Bolon, Teluk Lopian, Tanjung Rapuan, Pagar Bosi, Bangun Sordang, Aek Ger Ger Sidodadi, Pulo Pito Marihat, Siringan Ringan, Riah Naposo, Kampung Lalang, Sei Merbau, Rawa Masin, Banjar Hulu, dan Sordang Baru. Sampel yang diambil 24 untuk setiap kawasan, sehingga diperoleh desa sampel sebagai berikut:

- 1) Tinjowan mewakili bagian utara
- 2) Riah Naposo mewakili bagian barat
- 3) Pulo Pito Marihat mewakili bagian Timur
- 4) Sordang Bolon mewakili bagian Selatan

Desa yang paling terluas adalah Desa Pulo Pito Marihat dengan wilayah 1.767 ha, disusul dengan luas Desa Riah Naposo dengan luas wilayah 972, Desa Tinjowan dengan luas 816 ha, sedangkan Desa yang paling kecil adalah Desa Sordang Bolon dengan luas 800 ha.

Jumlah lingkungan masing-masing Desa, Desa Tinjowan dengan 6 lingkungan, Desa Riah Naposo dengan 4 lingkungan, Pulo Pito Marihat dengan 4 lingkungan, dan Desa Sordang Bolon dengan jumlah lingkungan sebanyak 5.

Desa Tinjowan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 2.617 jiwa, kemudian Desa Sordang Bolon yaitu sebanyak 2.090 jiwa, Desa Riah Naposo sebanyak 1.863 jiwa, dan yang terendah adalah Desa Pulo Pito Marihat yaitu sebanyak 1.151 jiwa.

Mata pencarian tani terbanyak adalah Desa Sordang Bolon yaitu sebanyak 452 orang, sementara yang terkecil adalah Desa Tinjowan yaitu sebanyak 42 orang. Mata pencarian wiraswasta terbanyak adalah 95 orang yaitu di Desa Pulo Pito Marihat dan yang terkecil di Desa Riah Naposo yaitu sebanyak 26 orang. Untuk PNS yang terbanyak adalah 26 orang di Desa Tinjowan sementara yang terkecil adalah Desa Pulo Pito Marihat yaitu sebanyak 9 orang.

Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Responden

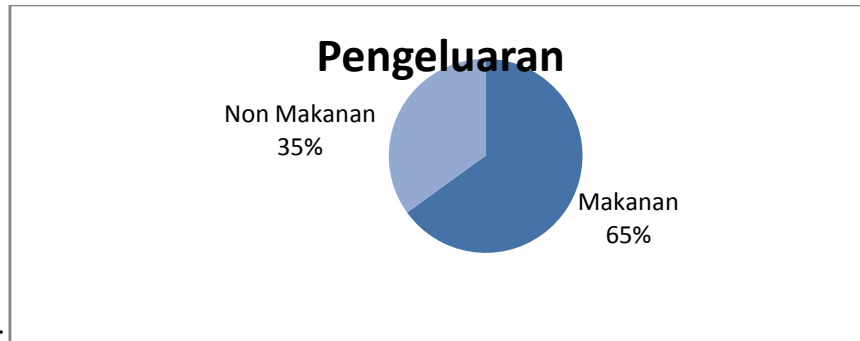
Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga responden yang dimaksud disini adalah seluruh pengeluaran rumah tangga miskin yang telah diteliti oleh peneliti. Pola pengeluaran rumah tangga miskin dibagi 2 yaitu: pola pengeluaran konsumsi dan non konsumsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 5
Distribusi Rata-rata Pengeluaran Berdasarkan Jenis Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran perbulan (Rp)	Persentase
Makanan	Rp. 566.742	64,4
Non Makanan	Rp. 314.052	35,6
Jumlah	Rp. 880.794	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata pengeluaran makanan perbulan adalah sebesar Rp. 566.742 atau sekitar 64,4%, sedangkan untuk pengeluaran non makanan sebesar Rp. 314.052 atau sekitar 35,6% dari jumlah keseluruhan Rp. 880.794. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini



Gambar 4.1
Pola Pengeluaran Rumah Tangga Responden

Pola Pengeluaran Konsumsi Makanan Rumah Tangga Responden

Pola pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga responden yang dimaksud disini adalah seluruh jumlah rata-rata pengeluaran konsumsi makanan para responden yang menjadi sampel penelitian. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan ini terdiri dari banyaknya makanan yang responden konsumsi perbulan. Untuk lebih jelasnya dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6
Distribusi Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perbulan (Rp)

Rata-rata Pengeluaran	Banyaknya Responden	Persentase
Rp. 200.000-Rp. 300.000	9	9,3
Rp 301.000-Rp. 400.000	4	4,1
Rp. 401.000-Rp. 500.000	13	13,5
Rp. 501.000-Rp. 600.000	22	22,6
Rp. 601.000-Rp. 700.000	40	41,2
Rp. 701.000-Rp. 800.000	7	7,2
>Rp. 801.000	2	2,1
Jumlah	97	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi yang paling banyak adalah pengeluaran Rp. 601.000-Rp. 700.000 sebanyak 40 orang responden atau 41,2%, dan diurutan kedua adalah rata-rata pengeluaran Rp. 501.000-Rp. 600.000 sebanyak 22 orang responden atau 22,6%, selanjutnya rata-rata pengeluaran Rp. 401.000-Rp. 500.000 sebanyak 13 orang responden atau 13,5%, rata-rata pengeluaran Rp. 200.000-Rp. 300.000 sebanyak 9 orang responden atau 9,3%, rata-rata pengeluaran Rp. 701.000-Rp. 800.000 sebanyak 7 orang responden atau 7,2%, rata-rata pengeluaran Rp. 301.000-Rp. Rp. 400.000 sebanyak 4 orang responden atau 4,1%, dan yang paling sedikit adalah rata-rata pengeluaran >Rp. 801.000 sebanyak 2 orang responden saja atau 2,1%.

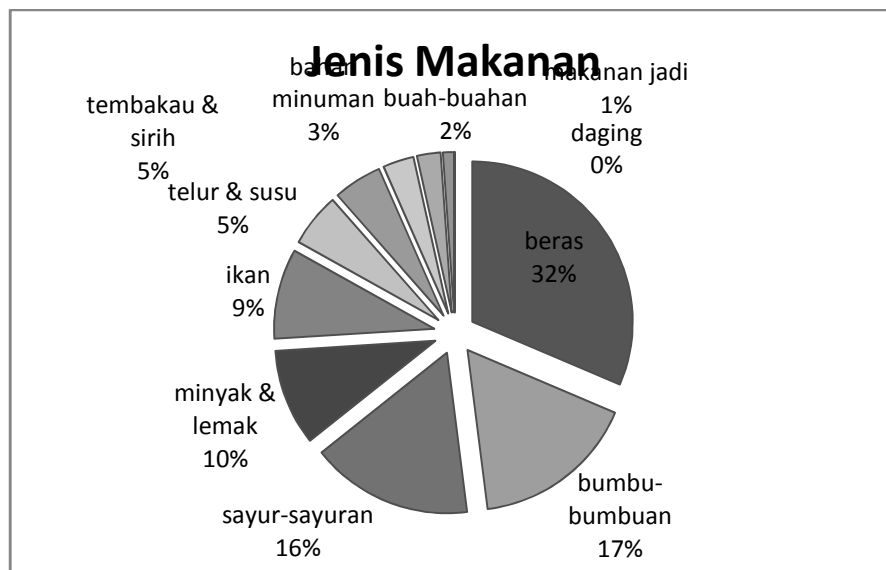
Pengeluaran konsumsi makanan terbagi untuk pengeluaran makanan pokok (beras), ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak dan lemak, bumbu-bumbuan, makanan jadi, bahan minuman, tembakau dan sirih. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 7
Distribusi Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Responden Berdasarkan Jenis Makanan Perbulan (Rp)

Jenis Makanan	Rata-rata Pengeluaran (Rp)	persentase
Makanan pokok	176.907	31,4
Ikan	51.412	9,1
Daging	-	-
Telur dan susu	30.412	5,4
Sayur-sayuran	92.010	16,3
Buah-buahan	13.448	2,4
Minyak dan lemak	54.577	9,7
Bahan minuman	17.204	3,1
Bumbu-bumbuan	92.959	16,6
Makanan jadi	5.714	1,1
Tembakau dan sirih	31.789	4,9
Total	563.330	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa total dari seluruh rata-rata pengeluaran konsumsi berdasarkan jenis makanan adalah Rp. 563.330. Rata-rata pengeluaran jenis makanan pokok (beras) dengan jumlah rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 176.907 atau sekitar 31,4%, dan yang kedua bumbu-bumbuan dengan jumlah rata-rata pengeluaran Rp. 92.959 atau sekitar 16,6%, kemudian diikuti oleh pengeluaran sebesar Rp. 92.010 atau sekitar 16,3% untuk jenis makanan sayuran-sayuran, sedangkan minyak dan minyak rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 54.577 atau sekitar 9,7%, selanjutnya ikan rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 51.412 atau sekitar 9,1%, telur dan susu rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 30.412 atau sekitar 5,4%, tembakau dan sirih rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 31.789 atau sekitar 4,9%, bahan minuman rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 17.204 atau sekitar 3,1%, buah-buahan rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 13.448 atau sekitar 2,4%, makanan jadi rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 5.714 atau sekitar 1,1%, dan yang terakhir daging rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 0.



Gambar 4.2
Rata-rata Prngeluaran Konsumsi Responden

a. Pola Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Rumah Tangga Responden

Pola pengeluaran konsumsi non makanan rumah tangga responden dimaksud disini adalah seluruh jumlah rata-rata pengeluaran non makanan yang habis dibayarkan untuk kebutuhan non makanan para responden. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 8
Distribusi Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Perbulan (Rp)

Rata-rata Pengeluaran	Jumlah Responden	Persentase
Rp. 100.000-Rp. 200.000	23	23,7
Rp. 201.000-Rp. 300.000	26	26,8
Rp. 301.000-Rp. 400.000	29	29,9
Rp. 401.000-Rp. 500.000	12	12,4
>Rp 501.000	7	7.2
Jumlah	97	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran yang paling banyak adalah rata-rata pengeluaran Rp.301.000-Rp. 400.000 sebanyak 29 orang responden, yang kedua adalah rata-rata pengeluaran Rp. 201.000-Rp. 300.000 sebanyak 26 orang responden, selanjutnya rata-rata pengeluaran Rp. 100.000-Rp.200.000 sebanyak 23 orang responden, sedangkan rata-rata pengeluaran Rp. 401.000-Rp. 500.000 sebanyak 12 orang responden, dan rata-rata pengeluaran >Rp. 501.000 sebanyak 7 orang responden.

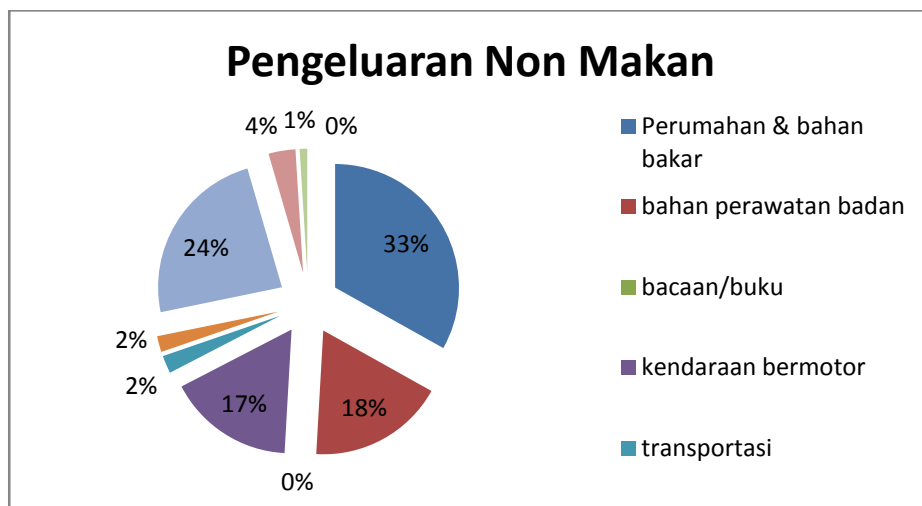
Pengeluaran responden untuk konsumsi non makanan diperinci atas pengeluaran untuk perumahan dan bahan bakar, aneka barang dan jasa (bahan perawatan badan, bacaan/buku, kendaraan bermotor, transfortasi, komunikasi),biaya pendidikan, biaya kesehatan, sandang, dan barang tahan lama. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 9
Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Berdasarkan Jenis Pengeluaran

No	Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran(Rp)	Persentase
1	Perumahan dan bahan bakar	105.165	33,1
2	Aneka barang dan jasa		
	a. Bahan perawatan badan	56.711	17,8
	b. Bacaan/buku	-	-
	c. Kendaraan bermotor	52.365	16,5
	d. Transportasi	7.500	2,3
	e. Komunikasi	6.856	2,1
3	Biaya pendidikan	75.052	23,7
4	Biaya kesehatan	11.495	3,5
5	Sandang	2.784	1
6	Barang tahan lama	-	-
	Total	316.485	100

Sumber: Hasil Penelitian

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa seluruh rata-rata pengeluaran konsumsi jenis non makanan yang paling banyak adalah perumahan dan bahan bakar sebesar Rp. 105.165 atau sekitar 33,1%, yang kedua adalah biaya pendidikan sebesar Rp. 75.052 atau sekitar 23,7%, yang ketiga adalah bahan perawatan badan sebesar Rp. 56.711 atau sekitar 17,8%, selanjutnya kendaraan bermotor sebesar Rp. 52.365 atau sekitar 16,5%, kemudian biaya kesehatan yaitu sebesar Rp. 11.495 atau sekitar 3,1%, transportasi yaitu sebesar Rp. 7.500 atau sekitar 2,3%, komunikasi yaitu sebesar Rp. 6.856 atau sekitar 2,1% dan sandang sebesar Rp. 2.784 atau 1%, untuk bacaan/buku dan barang tahan lama masing-masing Rp.0.



Gambar 4.3
Rata-rata Pengeluaran Non Makanan

A. Pembahasan

Pendapatan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan akan mempengaruhi tingkat pengeluaran seseorang atau rumah tangga. Rata-rata penghasilan Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 858.763 dengan rata-rata jumlah tanggungan dalam keluarga 3 orang tanggungan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Simalungun masih tinggi.

Tingkat pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan seseorang atau rumah tangga. Pada umumnya masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah, dengan pendapatan yang rendah akan berdampak pada rendahnya daya beli terhadap pendidikan sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena pendidikan berkaitan dengan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik pula dan begitu sebaliknya. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan dan kepala rumah tangga merupakan sumber penghasilan utama dalam rumah tangga. Sehingga pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala rumah tangga menjadi faktor penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga. Tingkat pendidikan di Kabupaten Simalungun masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada tabel 4.8 dimana tabel tersebut menggambarkan dari 97 sampel, sebanyak 40,2% hanya tamat SD.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Maka tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Di Kabupaten Simalungun rata-rata pengeluaran perbulan untuk makanan sebesar Rp.566.742, sedangkan untuk rata-rata pengeluaran perbulan non makanan sebesar Rp. 314.052. Maka Kabupaten Simalungun belum bisa dikatakan sejahtera, karena rata-rata pengeluarannya lebih banyak digunakan untuk mengkonsumsi makanan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga responden lebih besar terhadap konsumsi makanan yaitu sebesar Rp. 566.742, sedangkan rata-rata konsumsi non makanan yaitu sebesar Rp. 314.052.
2. Total seluruh pengeluaran konsumsi makanan adalah Rp. 566.742. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan yang paling banyak dikeluarkan rumah tangga responden adalah untuk pengeluaran beras sebesar Rp. 176.907 atau sekitar 31,4%, dan rata-rata pengeluaran konsumsi makanan yang paling banyak kedua bumbu-bumbuan dengan jumlah rata-rata pengeluaran Rp. 92.959 atau sekitar 16,6%. Kemudian diikuti oleh pengeluaran jenis makanan sayur-sayuran dengan rata-rata pengeluarannya sebesar Rp. 92.010 atau sekitar 16,3%. Sedangkan minyak dan lemak rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 54.577 atau sekitar 9,7%, untuk jenis

makanan ikan rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 51.412 atau sekitar 9,1%, untuk jenis makanan telur dan susu rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 30.412 atau sekitar 5,4%, jenis makanan tembakau dan sirih rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 31.789 atau sekitar 4,9%, untuk jenis makanan bahan minuman rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 17.204 atau sekitar 3,1%, jenis makanan buah-buahan rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 13.448 atau sekitar 2,4%, makanan jadi rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 5.714 atau sekitar 1,1%, dan yang terakhir daging rata-rata pengeluarannya adalah Rp. 0 atau tidak ada responden yang mengkonsumsi daging, dikarenakan harganya yang mahal.

3. Total seluruh rata-rata pengeluaran non makanan adalah rata-rata pengeluaran perumahan dan bahan bakar yang paling banyak yaitu sebesar Rp. 105.165 atau sekitar 33,1%, yang kedua adalah rata-rata pengeluaran biaya pendidikan sebesar Rp. 75.052 atau sekitar 23,7%, yang ketiga adalah rata-rata pengeluaran bahan perawatan badan sebesar Rp. 56.711 atau sekitar 17,8%, selanjutnya rata-rata pengeluaran kendaraan bermotor sebesar Rp. 52.365 atau sekitar 16,5%, kemudian rata-rata pengeluaran biaya kesehatan yaitu sebesar Rp. 11.495 atau sekitar 3,1%, dan rata-rata pengeluaran transportasi yaitu sebesar Rp. 7.500 atau sekitar 2,3%, yang paling sedikit adalah rata-rata pengeluaran bacaan/buku dan barang tahan lama yaitu Rp 0, kemudian yang paling ketiga adalah rata-rata pengeluaran komunikasi yaitu sebesar Rp. 6.856 atau sekitar 2,1%, dan rata-rata pengeluaran sandang sebesar Rp. 2.784 atau 1%.

Saran

1. Perlunya kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan. Mulai dari pemerintah pusat maupun daerah sampai masyarakat miskin itu sendiri.
2. Perlu adanya pengontrolan terhadap penyaluran program-program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan pada daerah penelitian sehingga program yang diberikan bisa tepat sasaran.
3. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya mengutamakan bantuan terhadap sektor pendidikan.
4. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal. Khususnya pada sektor informal seperti pertanian, perlu peningkatan keterampilan untuk meningkatkan hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, H.W. (1987). *Pembangunan dan Pemerataan : Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta:LP3ES.
- Badan Pusat Statistik. (2004). *Kemiskinan Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Simalungun Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Dahuri dan Nugroho. (2002). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3S.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- _____. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Todaro, Michael. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2008). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono. (2003). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahrin Syaparuddin Hardiani. (2013). *Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Vol 2 No.1, Juli-September 2014.
- <http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>. Diakses 29 Desember 2015
- <http://utamijayanti12.blogspot.co.id/2015/06/kemiskinan-dan-kesenjangan.htm/?=1>. Diakses 10 Januari 2016
- <https://bunawolo.wordpress.com/2013/02/13/indeks-kemiskinan/>. Diakses 10 Januari 2016.